

**GRATIS**  
TANPA IURAN

E-PAPER  
**koran**Nusantara  
www.koranusantara.com

**EDISI RABU**  
21 JUNI 2023



**KEMENPUPR KLAIM 22 PAKET IKN  
SUDAH TERKONTRAK**

**MIMPI SBY SOAL MEGAWATI & JOKOWI  
DIKAITKAN POLITIK  
PRAKTIS**





Susilo Bambang Yudhoyono bermimpi naik satu kereta bersama Megawati dan Joko Widodo.

## Mimpi SBY soal Megawati & Jokowi Dikaitkan Politik Praktis

**JAKARTA** – Cuitan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun Twitter-nya membuat heboh. Hal yang wajar lantaran dalam cuitannya tersebut, presiden keenam RI tersebut bercerita tentang tentang mimpinya, yakni naik kereta api (KA) bersama Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo serta presiden kedelapan. Sudah barang tentu, situasi tersebut memunculkan sejumlah tafsir politik. Salah satunya, peluang PDI Perjuangan dan Partai Demokrat berada dalam gerbong koalisi di Pilpres 2024.

Terlebih, twit SBY itu bersamaan dengan momen pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebelumnya, pertemuan dua tokoh muda itu disebut juga sebagai pertemuan rekonsiliasi.

Namun, tafsir itu dibantah Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Dia menyebut pernyataan SBY tidak terkait dengan politik praktis. "Saya kira berlebihan. Dinamika politik hari ini kan masih dinamis sekali," ujarnya Selasa, 20 Juni 2023.

Meski tak bisa menafsirkan secara pasti, Hinca menilai pernyataan SBY itu lebih kepada pesan moral. Suatu saat nanti Jokowi menuntaskan tugasnya, lalu tiga mantan presiden itu kembali ke asal masing-masing. "Bersama-sama kembali ke kam-

pung halaman. Itu artinya kembali ke rakyatnya masing-masing. Bagaimana menjadi rakyat setelah tidak berkuasa," tuturnya.

Soal kemungkinan pertemuan yang diimpikan itu, Hinca menyebut pertemuan SBY dan Megawati menjadi harapan banyak orang. Jika terwujud, tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk masyarakat. Namun, soal realisasinya, Hinca tidak memaparkan secara pasti. Dia hanya menyebut, sejauh ini komunikasi terus dibangun. "Saya kira sesuatu yang dirindukan juga dan kembali ke mereka berdua," katanya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menambahkan, di balik cuitan SBY itu, pihaknya menangkap semangat rekonsiliasi dalam bingkai silaturahmi politik kebangsaan. Di tengah kompleksnya problematika kebangsaan menjelang Pilpres 2024, silaturahmi politik di level elite menjadi penting. Tujuannya, menciptakan suasana kondusif. "Kita tak ingin mengulang dinamika politik dalam tensi yang terlalu tinggi dan panas seperti pada 2019," jelasnya.

Sebelumnya, SBY bermimpi melakukan perjalanan naik KA bersama Jokowi dan Megawati. "Saya bermimpi, suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya, kami bertiga

menuju Stasiun Gambir," tulis SBY.

Di Stasiun Gambir, sudah menunggu presiden kedelapan dan beliau telah membelikan karcis KA Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Karena masih ada waktu, sejenak kami berempas minum kopi sambil berbincang santai," papar SBY.

Setelah itu, SBY, Jokowi, dan Megawati naik KA Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan, mereka menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. "Rakyat yang pernah kami pimpin dengan kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan," sambungnya.

Setiba di Solo, Jokowi dan SBY turun dari kereta. Lalu, Jokowi kembali ke kediamannya. "Saya terus ke Pacitan dengan bus, sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno," pungkas SBY.

Presiden Jokowi menyambut baik mimpi SBY soal satu kereta dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Menurut SBY, dalam mimpi itu tiket kereta dibayari presiden kedelapan RI. Jokowi menilai mimpi tersebut baik. Menurutnya, mimpi itu mencerminkan persatuan para pemimpin bangsa ini.

"Ya bagus. Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu kerja sama, bersama-sama, membangun negara ini," kata Jokowi di Gresik, Selasa, 20 Juni 2023. **(kn)**



## 2027, KADIN PREDIKSI EKONOMI DIGITAL TEMBUS RP 3.216 TRILIUN

**JAKARTA** - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi digital semakin pesat. Sektor ini akan menjadi salah satu kontributor penting pada perekonomian secara keseluruhan. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 3.216 triliun pada 2027.

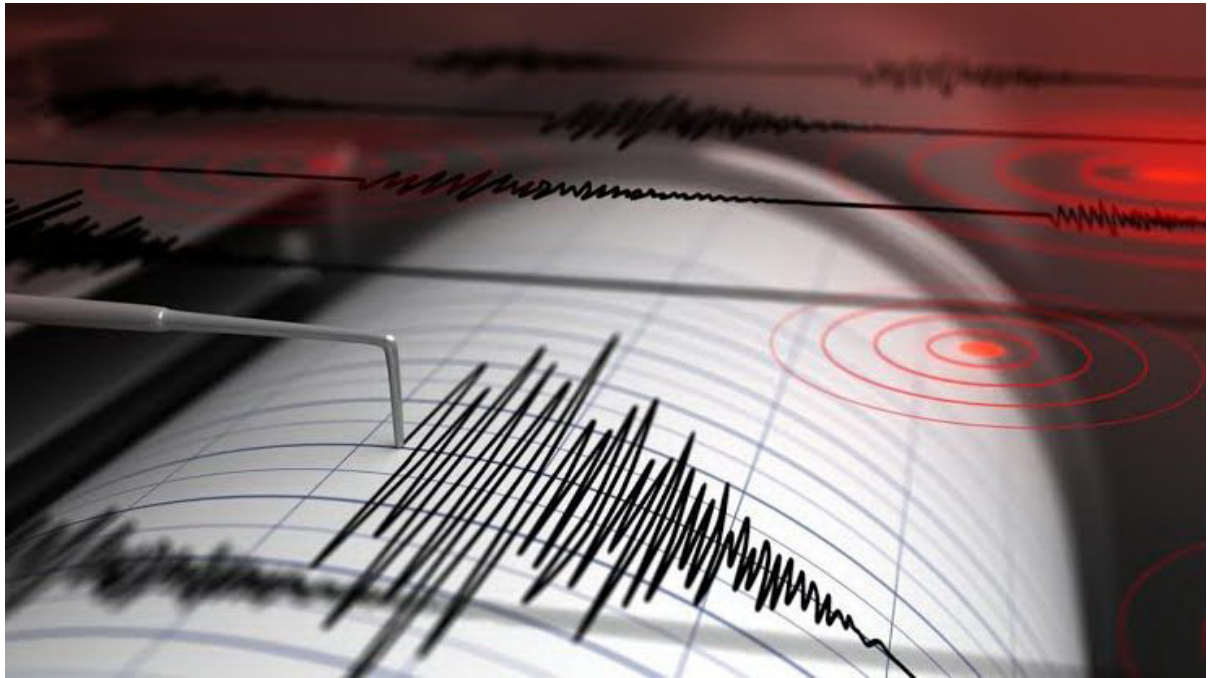
Ketua Kadin Bidang Kominfo Firlie H Ganinduto mengatakan, pada 2020 pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp 1.408 triliun atau sekitar 8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adopsi teknologi yang semakin luas di berbagai sektor telah mendorong pertumbuhan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. "Perkiraan pertumbuhan ekonomi digital akan terus berkembang pesat dengan mencapai Rp 3.216 triliun pada tahun 2027," ujar Firlie di

Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.

Pada 2027, lanjut dia, sektor ekonomi digital diperkirakan menyumbang sekitar 14 persen dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 23.533 triliun. "Adanya pertumbuhan yang pesat dalam sektor ekonomi digital, Indonesia diharapkan menjadi salah satu pemain utama di Asia Tenggara, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing negara dalam skala global," papar Firlie. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan dalam pengembangannya. Di antaranya, literasi keuangan digital, kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi, kesadaran pengusaha untuk melindungi data pribadi konsumen, serta menerapkan langkah-langkah strategis demi keamanan siber

masih belum tinggi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menambahkan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, otomatisasi dan digitalisasi, semakin penting ada kolaborasi strategis antara pengusaha dengan seluruh stakeholder. "Baru 22 persen dari total UMKM di Indonesia yang telah terdigitalisasi. Selain itu, keamanan siber juga masih menjadi tantangan, di mana selama periode 2020-2021 tercatat peningkatan cyber threat sebesar 231 persen. Di bidang sumber daya manusia, Indonesia juga masih kekurangan 400 ribu-500 ribu talenta digital per tahunnya. Padahal pada 2030, diperkirakan kebutuhan talenta digital Indonesia akan mencapai 9 juta orang," beber Arsjad. **(kn)**



## GEMPA MAHULU TERASA HINGGA SAMARINDA

**UJOH BILANG** - Gempa bumi bermagnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Selasa siang, 20 Juni 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme geser atau strike slip. Akibatnya, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Peristiwa langka itu membuat warga panik. Getarannya bahkan terasa sampai ke Samarinda.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu Agus Darmawan membenarkan kejadian tersebut hampir dirasakan di seluruh kecamatan di Mahulu. Meski hanya berlangsung beberapa detik, warga yang baru pertama kali merasakan gempa berlarian ke luar rumah dan bangunan. "Tidak ada korban maupun dampak yang berarti. Semoga tidak ada gempa susulan," harapnya.

Pihaknya masih berkoordinasi untuk memastikan sejauh mana dampak gempa terhadap warga dan lingkungan sekitar. Dia pun mengimbau warga untuk tetap

tenang namun waspada. "Tidak ada info lagi soal adanya susulan gempa, namun kita minta masyarakat tetap waspada. Karena ini kejadian pertama kali," sebutnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi di Mahulu ini terjadi pada Selasa ini pukul 12.43.32 WIB atau pukul 13.43.32 Wita. Hasil pendataan yang dilakukan oleh pihaknya hingga petang, kata dia, tidak menemukan adanya warga yang terdampak ataupun kerusakan bangunan atas peristiwa tersebut, namun pihaknya telah mengimbau warga agar melaporkan kepada BPBD Mahulu jika kemudian ditemukan adanya warga yang terdampak ataupun hal lainnya.

"Pendataan yang kami lakukan, baik di Kecamatan Long Hubung maupun di Ujoh Bilang, tidak menemukan adanya dampak karena yang dirasakan hanya getaran ringan. Kami juga imbau masyarakat tidak mudah percaya dengan isu susulan gempa, kecuali dari BMKG," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya pun tetap mengacu

dari BMKG mengenai berbagai hal terkait alam, seperti gempa bumi, hujan petir, hujan lebat dan lainnya, sehingga jika ada kabar yang tidak jelas mengenai fenomena alam, hal itu harus diabaikan.

Secara terpisah, Kepala BMKG Stasiun Sepinggian Balikpapan Kukuh Rubidiyanto juga mengimbau masyarakat di Kabupaten Mahulu, Kota Samarinda, dan sekitarnya agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti Instagram/Twitter @infoBMKG, website (<http://www.bmkg.go.id>) atau [inatews.bmkg.go.id](http://www.inatews.bmkg.go.id)," katanya.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi di Mahulu memiliki parameter M4,6. Epicentrum gempa bumi terletak pada koordinat 0.63 LU dan 114.99 BT, tepatnya berlokasi 47 km Tenggara Mahulu, Kalimantan Timur, pada kedalaman 10 kilometer. **(kn)**



Ditjen Bina Konstruksi KemenPUPR memastikan pembangunan IKN menggunakan material ramah lingkungan.

## KEMENPUPR KLAIM 22 PAKET IKN SUDAH TERKONTRAK

**JAKARTA** - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, hingga 16 Juni sebanyak 22 paket Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terkontrak.

"Untuk IKN, total sebanyak 88 paket dengan total nilai Rp 8,46 triliun. Di mana terdapat 26 paket yang belum tender, kemudian ada 40 paket yang proses tender. Sedangkan untuk paket yang sudah terkontrak ada 22 paket dengan total nilai Rp2,68 triliun dari 88 paket," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.

Rachman Arief menambahkan, paket pembangunan IKN yang sudah terkontrak itu kebanyakan dari sektor sumber daya air, bina marga, cipta karya maupun perumahan. Sedangkan un-

tuk 40 paket IKN dengan total nilai Rp1,64 triliun yang dalam proses tender, terdiri dari 34 paket belum penetapan dan 6 paket sudah penetapan pemenang.

Rachman Arief mengatakan bahwa total paket 88 untuk IKN tersebut masih sementara dan bisa jadi ke depannya bertambah. Terkait dengan material konstruksi berkelanjutan, Ditjen Bina Konstruksi berupaya memastikan pembangunan IKN menggunakan material ramah lingkungan. "Ada beberapa upaya kita untuk memastikan badan usaha menggunakan material yang ramah lingkungan," kata Rachman Arief.

Adapun beberapa material konstruksi ramah lingkungan, seperti semen Non Ordinary Portland Cement (Non OPC), beton pracetak, dan material bersifat green construction. "Harapannya seperti itu. Nanti kita upayakan

semuanya berkelanjutan," kata Rachman Arief.

Visi IKN sebagai smart forest city menjadi panduan dalam pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat.

Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di Kompleks IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. **(kn)**



Hosted by:



# INDONESIA JUSTICE CONFERENCE 2023



**Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.**  
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia  
*\*\* Subject to confirmation*



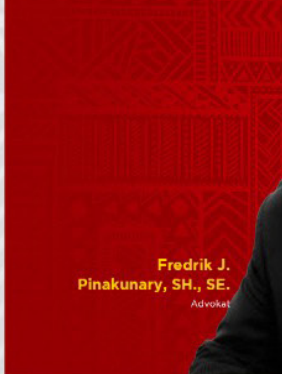
**Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum**  
Hakim Mahkamah Konstitusi



**Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana**  
Senior Pastor of GBI ROCK Ministry



**Mark Mudri**  
Church Relations SA ACT Bible Society Australia  
Chair global council Advocates International



**Fredrik J. Pinakunary, SH., SE.**  
Advokat



**Tony Budidjaja, SH., LL.M, Dipl. CI Arb, FCI Arb.**  
Managing Partner Budidjaja International Lawyers,  
Direktur Lawyarinindo Legal Support Center



**Dr. Albert Aries, SH., MH**  
Pengajar FH Universitas Trisakti

## OTHER SPEAKERS:

Pdt. Matius Arif Mirdjaja, SH | Dr. Stefanie Hartanto, SH., M.Kn | Pdt. Kongkin Atmodjo  
Dr. Linda Bustan, M.Div. | Yonathan Andre Baskoro, S.H., LL.M., M.AP and many more...

## THEME

### Restoring Justice, Transforming Nation

Amos 5:24 "Tetapi biarlah **keadilan** bergulung-gulung seperti air dan **kebenaran** seperti sungai yang selalu mengalir."



**30 JUNE  
- 01 JULY  
2023**



**MENORAH HALL  
LEMBAH PUJIAN**

JL. ANTASURA - NANGKA UTARA,  
DENPASAR UTARA, BALI



**REGISTRATION  
FEE:**

1. PROFESIONAL IDR. 300.000  
2. PELAJAR DAN MAHASISWA IDR. 200.000



Registration:  
<http://tiny.cc/Indojc2023>

Information:  
Michelle - 082217014339  
Junus BM - 0821 1021 1110



Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Kalimantan di Hotel Gran Senjiur, Balikpapan, Selasa, 20 Juni 2023.

## MENKO POLHUKAM AWASI PEMILU DI KALTIM

**BALIKPAPAN-** Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kalimantan Timur (Kaltim) tinggi. Skor IKP Kaltim sebesar 77,04. Hal itu berdasarkan hasil analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Mahfud tak memerinci bentuk pelanggaran yang terjadi.

"Mengapa memilih Kalimantan Timur? Atau kota Balikpapan ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu," kata Mahfud usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tema Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan yang digelar di Hotel Gran Senjiur Balikpapan, Selasa, 20 Juni 2023.

Mahfud mengatakan bentuk pelanggaran pada pelaksanaan pemilu bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya, kata dia, politik uang. "Bisa penghapusan dokumen, kan banyak tuh. Surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim lalu kemudian dihimpun

oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili oleh orang yang bersangkutan untuk menyoblos," ungkap Mahfud.

"Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi, lalu difoto, lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kotak suara," sambungannya. Mahfud menegaskan, contoh yang ia sebutkan bukan terjadi di Kaltim, tetapi saat ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan semua partai politik agar turut mengawal kesuksesan pemilu.

"Pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Dan tahun 2024, mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi 2019 dan sebelumnya," katanya. "Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan," pungkasnya.

IKP merupakan sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk provinsi dengan kategori rawan tinggi, selain Kaltim ada Jakarta dengan

skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat memiliki skor yang sama dengan Kaltim 77,04.

Pada Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu itu, Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, dan kejaksaan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum bahwa pemilu yang dilaksanakan dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik.

Isu kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang notabene empat provinsi anyar yang baru saja dibentuk pada tahun ini, agar siap mengikuti ritme. Isu ketiga, yakni masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik. Isu keempat, perlunya langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di dunia maya. Isu kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan. **(kn)**



Lebih Dekat dengan Satu Klik



TERVERIFIKASI  
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

# "TINDAK PIDANA PEMILU DI KALTIM TINGGI"

BACA HALAMAN 2-4



## DIDUGA KORUPSI, KADES DI PASER TERNYATA SUDAH DITAHAN 10 HARI

BACA HALAMAN 24





Menkopoldukam RI, Mahfud MD saat menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan, Selasa (20/6/2023).

# Menkopoldukam: Tindak Pidana Pemilu di Kaltim Tinggi

**BALIKPAPAN** - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopoldukam), Mahfud MD mengungkapkan bahwa provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu wilayah yang memiliki kasus tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) yang cukup tinggi.

"Itu berdasarkan hasil Sigi yang dilakukan Bawaslu," ujarnya usai membuka Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan, Selasa (20/6/2023).

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, adapun kerawanan Tindak Pidana Pemilu di Kaltim ada sebanyak 66 poin. Hanya saja yang paling tinggi terjadi seperti politik uang hingga pemalsuan dokumen.

"Tapi sekarang penyelenggara Pemilu ini sudah membuat pengamanan dokumen menggunakan stiker hologram. Ini kecil kemungkinannya bisa dipalsukan oleh orang-orang tertentu," jelasnya.

Disinggung wilayah kerawanan Tindak Pidana Pemilu, Mahfud me-

negaskan jika hampir di seluruh wilayah rawan terjadi. Baik di dalam kota maupun pedesaan bahkan perbatasan.

"Di mana saja bisa terjadi. Tidak hanya di dalam kota, di perbatasan juga bisa terjadi," tambahnya.

Mahfud berharap pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang jauh lebih baik lagi, baik dari segi pelaksanaan hingga pengawasannya. **(bom)**

# Mahfud Mewanti-wanti Penegakan Hukum Pemilu Dilakukan dengan Hati-hati untuk Hindari Kegaduhan

**BALIKPAPAN**—Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia menggelar Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Hotel Grand Senyuir Balikpapan pada Selasa (20/6/2023) pagi ini.

Forum ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait penegakan hukum dalam Pemilihan Umum di wilayah hukum Se-Provinsi Kalimantan.

Laporan kegiatan disampaikan oleh Dr. Sugeng Pumomo, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Sementara Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., S.U., MIP, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, membuka acara tersebut.

Dalam kesempatan ini, Prof. Mahfud MD menekankan pentingnya

Sentra Gakkumdu bekerja secara profesional dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dalam penegakan hukum pemilu.

"Penegakan hukum dalam pemilihan umum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi. Kepentingan politik yang sarat harus ditangani secara profesional dan berdasarkan bukti yang kuat," jelasnya.

Prof. Mahfud MD juga meminta ada kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi penegakan hukum terkait pemilihan umum.

Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga integritas demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur. Melalui kerja sama erat antara lembaga-lembaga terkait,

diharapkan penegakan hukum dalam pemilihan umum dapat ditingkatkan, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Bawaslu se-Kalimantan Timur, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam penegakan hukum di Pemilihan Umum, narasumber utama acara juga menerima plakat penghargaan.

Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu ini menjadi wadah penting untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum dalam pemilihan umum. Dengan adanya forum ini, diharapkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait pemilihan umum dapat lebih efektif dan transparan. (MK)



# Menkopolhukam Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Pungli di Rutan KPK

**BALIKPAPAN-** Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya.

Menurut data yang dipegang Dewan Pengawas KPK, pungli tersebut mencapai Rp4 miliar. Sebelumnya Menko Polhukam berbicara dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu Pemilu) di Balikpapan, Selasa.

"Hal itu harus dibuka ke publik dan setelah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tin-

dak pidana," jelas Menkopolhukam. Apalagi ini terjadi di tubuh lembaga pemberantasan korupsi, KPK.

Namun demikian, Mahfud juga mengakui sejauh ini dirinya belum mengetahui detail kasus tersebut. Menkopolhukam masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan.

Menurut Menteri Mahfud, jika pungli tersebut melibatkan dana yang cukup besar, maka bisa disebut atau dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan.

"Saya belum tahu apakah pungli atau penyuapan. Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up (menaikkan harga), mark down (menurunkan harga), pemalsuan dokumen, pemerasan

dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli," beber Menteri Mahfud.

Mahfud menegaskan, pungutan liar adalah korupsi karena perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Pada jerat hukumnya, pungli dan korupsi menggunakan pasal dakwaan yang sama.

"Antara pungli dan korupsi itu pasal dakwaannya di dalam hukum sama, cuma biasanya ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan," jelasnya. **(antara/MK)**

*Pewarta : Novi Abdi  
Editor : Guido Merung*

# Mahfud MD Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik Cegah Politik Uang

**JAKARTA-** Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD menekankan pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih demi mencegah politik uang saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud menjelaskan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang ikut aktif mengawasi tahapan pemilu juga dapat membantu tugas badan-badan pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum (APH).

"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang," kata Menko Polhukam Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.

Mahfud lanjut menilai partisipasi aktif masyarakat yang diperkuat dengan pendidikan politik dapat menjaga pemilu tetap berkualitas dan berintegritas.

Dalam forum yang sama, Mahfud

menyampaikan pemerintah selalu mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana pemilu.

"Itu merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder (parapemangku kepentingan) segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu, karena (itu) termasuk money politic (politik uang) yang diancam dengan pidana," kata Mahfud MD.

Oleh karena itu, berbagai langkah untuk mencegah pelanggaran jauh lebih baik untuk dikedepankan daripada menunggutindak pidana itu terjadi.

Mahfud lanjut mengingatkan para penegak hukum kemungkinan adanya kepentingan politik yang kuat menjelang Pemilu 2024 yang dikhawatirkan memengaruhi kerja penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh APH tidak akan lepas dari tarikan politik. Kekhawatiran

masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Menko Polhukam RI.

Dalam forum yang sama, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menyampaikan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu punya peran penting dalam menindak pelanggaran pidana pemilu.

"Di samping untuk menyamakan persepsi unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, juga sebagai upaya mengatasi batasan waktu yang singkat dalam proses hukum pelanggaran pidana pemilu," kata Sugeng Purnomo. **(antara/MK)**

*Pewarta : Genta Tenri Mawangi  
Editor : Budi Suyanto*



[toko.radarmedia.id](http://toko.radarmedia.id)

MK·CO



MEDIA KALTIM GROUP



## Dinas Kependudukan Kaltim Dorong Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi untuk Atasi Stunting

**SAMARINDA** - Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari beberapa faktor kesehatan bagi remaja milenial saat ini.

Berdasarkan data dari Save The Children tahun 2020, menyatakan bahwa 32 persen remaja Indonesia usia 5-14 tahun dan usia 15-24 tahun mengalami anemia. Dua dari tiga perempuan usia 20-24 tahun menikah kurang dari usia 18 tahun, dan 68 persen diantaranya hamil sebelum usia 18 tahun, dengan persentase sebesar 9,1 persen.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Soraylita, dalam kegiatan Pengembangan Program Desain Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi (KIE) Sesuai Kearifan Lokal bagi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), yang diselenggarakan di Hotel Harris Samarinda, pada hari Selasa (20/6).

Sementara itu, data menunjukkan bahwa 27 persen remaja usia 10-18 tahun pernah merokok, 27 persen pengguna Napza adalah pelajar, dan 4,4 persen pernah mengonsumsi alkohol. Selain itu, 50 persen anak remaja mengonsumsi makanan manis, 32 persen mengonsumsi makanan asin, 11 persen mengonsumsi makanan instan, dan 78 persen mengonsumsi makanan dengan penyedap.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya intervensi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja dalam menurunkan angka stunting.

Lebih lanjut, diperlukan peran aktif remaja dalam mencegah stunting, seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dengan konsumsi satu tablet per minggu, menerapkan pola makan sesuai pedoman gizi seimbang, serta rutin melakukan olahraga atau aktivitas fisik.

“Upaya ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tuturnya.

Soraya berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi wadah sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. ([kmf/adv/diskominfo Kaltim](#))





## Kepala Diskominfo Kaltim: Pelayanan Publik Harus Efisien dan Efektif

**BALIKPAPAN** - Dalam menghadapi era keterbukaan informasi publik dan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur perlu memperkuat kinerja mereka secara optimal dan profesional. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

Muhammad Faisal selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, mengatakan bahwa pelayanan publik, termasuk pelayanan informasi dan pengaduan, harus dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk secara berkala dan berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di dalam organisasi.

"Fokus PPID di seluruh Kabupaten/Kota harus berada pada pemahaman dan pengetahuan yang

seragam mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik. Melalui PPID, kita terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, PPID perlu diperkuat dengan personel yang kompeten," ucap Faisal, yang mewakili Wakil Gubernur Kaltim pada pembukaan Forum Koordinasi (FK) PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, pada Selasa (20/6/2023).

Faisal menjelaskan bahwa FK PPID dan Monitoring Evaluasi SP4N-LAPOR! merupakan kesempatan berharga bagi semua peserta untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah-langkah yang telah diambil dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta efektivitas pelaporan dan pengawasan di wilayah Kalimantan Timur.

Selaras dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah telah menjadi syarat utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

"Saya mendorong agar forum ini menjadi wadah bagi kita untuk saling berbagi pengalaman, praktik

terbaik, dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Bersama-sama, kita dapat mengidentifikasi solusi inovatif dan efektif untuk memperkuat pelaksanaan PPID dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Kaltim," kata Faisal.

Sebagai mantan pejabat Pemerintah Kota, ia yakin bahwa kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi SDM para pegawai, sehingga PPID dan aplikasi SP4N-Lapor dapat berperan secara aktif dan optimal. Hal ini akan membantu dalam strategi penyusunan rencana aksi dan pengambilan keputusan demi kebijakan yang lebih baik dan tidak melenceng manfaatnya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan pemerintah.

Kegiatan FK PPID dan Monitoring Evaluasi SP4N-LAPOR! dihadiri oleh 41 peserta pengelola PPID dan Diskominfo dari 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, Komisioner Komisi Informasi dan Jajaran Struktural serta Fungsional Diskominfo Kaltim. Narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PAN-RB, dan Akademi Universitas Mulawarman juga dihadirkan dalam acara ini. **(kmf/adv/diskominfokaltim)**



## Tingkatkan Pelayanan Publik, Diskominfo Kaltim Perkenalkan Program “SP4N-LAPOR! Masuk Desa”

**BALIKPAPAN-** Meskipun aplikasi umum untuk melaporkan atau mengadukan masalah masyarakat telah tersedia, masih ada tantangan dalam penggunaan dan pengelolannya.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Padahal, aplikasi ini telah ditetapkan sebagai aplikasi umum.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim berinovasi dengan meluncurkan program “SP4N-LAPOR! Masuk Desa” yang bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi layanan pengaduan ini ke 10 desa di 5 Kabupaten/Kota di Kaltim.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk serta meningkatkan

penyelesaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan serta memberikan pelayanan yang optimal.

“Masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui tentang layanan pengaduan ini. Padahal, semakin banyak pengaduan yang masuk melalui aplikasi, itu menandakan bahwa pemerintah dipercaya oleh masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan atau pengaduan sangat penting dalam pembangunan,” jelas Faisal saat memberikan arahan dalam acara Forum Koordinasi (FK) PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Selasa (20/6/2023).

Faisal mengungkapkan bahwa program SP4N-LAPOR! Masuk Desa akan mengunjungi Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara pada bulan Juli. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan Kabupaten Ku-

tai Kartanegara dan Kutai Barat pada bulan Agustus. Rencananya, pada bulan September akan dilakukan kunjungan ke Berau.

“Targetnya adalah agar 500 orang memahami SP4N-LAPOR!. Artinya, setiap Kabupaten akan dikunjungi dua desa, dengan jumlah 50 orang per desa. Dengan cara ini, mereka dapat langsung mengetahui tentang layanan pengaduan ini karena kami akan mendatangi mereka secara langsung, bukan hanya mengandalkan informasi dari media,” ucapnya.

Diskominfo Kaltim sangat mengharapkan peran dan dukungan dari Diskominfo Kabupaten, serta koordinasi dengan desa/kecamatan, radio lokal, dan media.

“SPN-LAPOR! dibentuk untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya. (cht/pt/adv/diskominfo kaltim)



## Wujudkan KLA, DPPKB Berikan Sosialisasi Pesantren Ramah Anak

BONTANG – Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bontang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) memberikan sosialisasi mengenai pesantren ramah anak kepada pesantren-pesantren yang ada di Kota Bontang.

Sosialisasi yang dilaksanakan di aula Dispopar Bontang menghadirkan asisten Deputi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara Daring (online), pada Selasa (20/6/2023).

Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli bidang pemerintahan dan hukum, Deddy Hariyanto mengatakan dalam rangka mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak, salah satu indikatornya yaitu penyediaan pendidikan maupun pengasuhan yang ramah anak di lingkungan pesantren.

Dikatakan, banyak yang menilai bahwa lingkungan pesantren adalah tempat yang aman dan nyaman. Sehingga dianggap hampir tidak mungkin anak-anak menjadi rentan mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis atau perlakuan salah lainnya.

Namun, lanjut Deddy, kasus kekerasan terhadap anak, terutama berbasis kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Kejahatan seperti itu tidak melihat potensi latar belakang pelaku maupun tempat peristiwa, termasuk di institusi berbasis agama, seperti pondok pesantren.

"Kekerasan terhadap santri yang dilakukan oleh oknum sesama santri, oknum tenaga pendidik maupun lingkungan di sekitar pesantren bisa kita jumpai di pemberitaan media

massa. Kekerasan seksual, perundungan verbal maupun fisik, yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, apalagi kematian harus menjadi perhatian bersama dan dicegah," jelas Deddy.

Melalui pesantren ramah anak nantinya diharapkan pesantren yang ada di Bontang dapat tumbuh dan berkembang menjadi tempat yang mampu memperkuat peran orangtua, penghuni pesantren (guru, pendamping asrama dan santri) dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren.

Sementara Kepala DPPKB, Bahauddin mengatakan sosialisasi pesantren ramah anak sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan mengimplementasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Ia mengatakan nanti pesantren dapat melaksanakan pesantren ramah anak sesuai dengan konveksi hak anak nasional.

Selain itu, implementasi pesantren ramah anak akan dilaksanakan dalam waktu dekat, namun tidak

semua pesantren tapi akan dilihat bagaimana sistem pendidikan dan sarana prasarana yang ada.

"Bukan hanya belajar, tapi ada juga hak anak bermain, berkumpul, bersosialisasi sesama teman supaya psikologi anak berkembang. Setelah ini akan kita follow up, kira-kira pesantren mana yang akan kita survei dulu mengenai sistem pembelajarannya dan sarana prasarananya yang akan kita bantu benahi menjadi pesantren ramah anak," kata Bahauddin.

Bahauddin juga berharap agar ke depannya peran orang tua dan pondok pesantren dapat memberikan perlindungan bagi siswa pesantren terlebih ketika pesantren ramah anak sudah terbentuk.

"Orang tua tidak takut lagi memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Sehingga ketika pesantren ramah anak terbentuk maka benar-benar ramah pada anak. Pengawasannya kita akan berkolaborasi dengan Kemenag dan dinas pendidikan," tutur Bahauddin. (adv/yah)



Pelaksanaan sosialisasi pesantren ramah anak ke pesantren di Bontang.





ANDHIKA DEZWAN/MEDKAL

Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

## Banyak Keluhan, Ratna Minta RSUD dr Abdul Rivai Benahi Pelayanan

**TANJUNG REDEB** - Banyaknya keluhan mengenai pelayanan antrian nomor urut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Ia menegaskan, seharusnya pihak RSUD dr Abdul Rivai berbenah dalam pelayanan antrian tersebut. Sebab, banyak masyarakat yang rela datang lebih pagi untuk mendapatkan nomor antrian terdepan.

"Tetapi mereka rata-rata sudah nomor sudah di atas 50. Hal ini membuat masyarakat kecewa. Mereka mengadu harus datang jam berapa agar bisa mendapatkan antrian yang cepat," ungkapnya, Selasa (20/6/2023).

Dirinya membeberkan bahwa jajaran DPRD Berau sudah pernah membahas hal tersebut dengan pi-

hak rumah sakit. Diketahui, penyebab keluhan antrian tersebut karena menggunakan sistem offline dan online.

"Menurut saya itu kurang tepat, karena tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan smartphone mereka. Tidak semua paham sistemnya, harus ada pembenahan," ujarnya.

Menurut Ratna, dalam sisi pelayanan harus dievaluasi. Sebab, masyarakat banyak mengeluhkan hal tersebut, terlebih adanya petugas yang kerap datang terlambat.

"Jika petugas datang terlambat, pelayanan jadi terhambat. Antrian semakin panjang. Mohon maaf, ini manusia yang dilayani," tegasnya.

Politikus Golkar ini menuturkan, permasalahan tersebut jangan sampai berlarut-larut. Karena dikha-

watirkannya membuat masyarakat enggan untuk berobat ke rumah sakit. Karena antrian yang dianggap tidak sesuai.

"Terapkan sistem offline. Biarkan masyarakat datang. Jelaskan itu loket dibuka jam berapa, agar masyarakat tahu. Saya akui, saya dapat informasi, ada yang datang jam 6 namun nomor antrian sudah jauh," bebarnya.

Ratna berharap, agar ada perubahan sistem pelayanan dari rumah sakit pelat merah tersebut. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Agar pelayanan bisa berjalan maksimal.

"Kasihani masyarakat yang jauh. Terkadang sudah lama antre, tapi pelayanan tidak maksimal," pungkaskannya. (adv/dez)



ANDHIKA DEZWAN/MEDKAL

Foto bersama usai melakukan revitalisasi benda bersejarah.

## Revitalisasi Sejarah Dinilai Penting, Pemkab Berau dan Direktorat Preservasi ANRI Perbaiki Arsip Kuno

**TANJUNG REDEB** - Revitalisasi benda bersejarah dinilai penting untuk mencegah hilangnya informasi masa lampau. Sehingga ada warisan untuk generasi selanjutnya.

Guna menindaklanjuti revitalisasi sejarah itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih bersama Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Agus Santoso mengunjungi kediaman Kesultanan Gunung Tabur, Selasa (20/6/2023).

Sri Juniarsih mengatakan, kegiatan tersebut selaras dengan salah satu 18 program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengenai revitalisasi situs sejarah.

"Jadi kunjungan ANRI ini adalah untuk merevitalisasi benda bersejarah, khususnya peninggalan kerajaan yang ada di Berau," terangnya.

la menilai, kedatangan kearsipan

nasional ke Bumi Batiwakkal itu sangat membantu Pemkab Berau dalam merawat peninggalan kuno.

"Apalagi proses perawatan benda peninggalan kerajaan ini memerlukan waktu cukup lama, bahkan harus dilakukan secara berurutan," tuturnya.

Menurut kepala daerah perempuan pertama ini, pelestarian benda bersejarah sangat penting. Terlebih situs sejarah dapat dipadukan dengan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Berau.

"Apalagi daerah kita merupakan penyangga IKN. Jika situs sejarah dirawat dengan baik, saya kira bisa menjadi daya tarik wisatawan," jelasnya.

Sri Juniarsih berharap peninggalan sejarah dapat terus dilestarikan. Sehingga bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. "Seluruh

peninggalan kerajaan harus dijaga keasliannya. Apa yang harus dirawat mari kita lestarikan bersama," imbuhnya.

Lebih lanjut, Direktur Preservasi ANRI, Agus Santoso menyebut, Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang situs sejarahnya harus dirawat.

"Apalagi Berau memiliki arsip kuno, jadi harus dirawat agar informasi masa lampau tidak akan hilang," sebutnya.

Dia menegaskan bahwa restorasi benda bersejarah harus dilakukan, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui sejarah masa lampau.

"Perbaikan ini bisa bermanfaat untuk generasi selanjutnya dan juga dapat memperpanjang umur benda sejarah hingga 150 tahun ke depan," pungkasnya. (adv/dez)



ANDHIKA DEZWAN/MEDKAL

Bupati Berau, Sri Juniarsih

## Pembangunan BLK Terus Menunjukkan Perkembangan, Bupati Harap Rampung Tahun Ini

**TANJUNG REDEB** - Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) terus menunjukkan perkembangan. Wacana tersebut nampaknya akan segera terealisasi, sebab kesiapan lahan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih menerangkan, sementara ini para pencari kerja dapat mengasah keterampilannya melalui program yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

"Pembangunan BLK ini perlahan kami realisasikan secara bertahap. Saya harap segera terwujud, karena ini sangat penting bagi para pencari kerja," ungkapnya, Selasa (20/6/2023).

Ia menilai, dengan adanya BLK tersebut dapat memberi dampak positif kepada pencari kerja. Pasalnya, dapat memaksimalkan keterampilan para pencari kerja.

"Selain itu juga dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja," katanya.

Pembangunan BLK tersebut

juga termaktub dalam 18 program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Jika terealisasi, akan meningkatkan keterampilan pencari kerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

"Saya harap dengan adanya BLK nanti dapat melakukan sertifikasi pada bidang tertentu sebagai bukti para pencari kerja sudah siap. Sehingga, para perusahaan juga dapat menerima dengan gaji yang layak," tuturnya.

Sementara, Pj Kepala Disnakertrans Berau, Muhammad Said membeberkan bahwa saat ini pembangunan BLK telah memasuki tahap desain serta pembangunan fisik gedung.

"Mengenai BLK itu, kami hanya sebatas mempersiapkan tempat. Untuk desain dan pembangunan fisik merupakan kewenangan Dinas PUPR," terangnya.

Dirinya mengaku optimistis bahwa pembangunan BLK tersebut dapat segera terealisasi pada tahun ini. "Lahannya sudah tersedia

tinggal realisasi pembangunannya saja lagi. Kami akan menunggu itu dapat segera dikerjakan," imbuhnya.

Dipaparkannya, lokasi BLK yang telah ditetapkan berada di Kecamatan Sambaliung dengan luas lahan sekitar 5 Haktare. "Luas lahan itu sudah lebih dari cukup untuk pembangunan gedung BLK," sebutnya.

Said menjelaskan, desain pembangunan BLK akan terbangun cukup akomodatif dari segi gedungnya. Supaya dapat menyamai atau melebihi dari BLK lain yang ada di Kalimantan Timur.

"Saya harap BLK yang akan dimiliki oleh Kabupaten Berau dapat menyamai BLK dari daerah lain," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, keberadaan BLK nantinya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. "Saat ini jika ada pelatihan khusus kami kirim ke luar daerah. Maka dari itu, saya harap pembangunan BLK dapat segera terealisasi," pungkasnya. (adv/dez)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala DLH PPU Tita Deritayati.

## DLH PPU Upayakan Perbup Jam Buang Sampah Segera Rampung

PPU - Untuk menegaskan waktu buang sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Penajam Paser Utara (PPU) mengharapkan peraturan bupati (perbup) dapat segera diterbitkan. Hal ini sebagai upaya untuk melancarkan penanganan sampah di Benuo Taka.

Kepala DLH PPU, Tita Deritayati mengakui saat ini pihaknya masih memiliki berbagai kendala dalam penanganan. Mulai dari keterbatasan armada hingga perlunya regulasi untuk maksimalisasi tata kelola sampah.

"Terkait tata kelola sampah di PPU punya pola penanganan dan pola pengurangan. Terkait pola penanganan, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mengatasinya hingga tuntas," jelas dia, Selasa (20/6/2023).

Jika dalam pola penanganan,

jelasnya, pihaknya telah memberikan pelayanan berupa pengangkutan sampah. Saat ini pihaknya menargetkan meningkatkan penanganan sampah.

Itu karena dari empat kecamatan di PPU, belum semua wilayah bisa terjangkau. Selain itu, keterbatasan armada dan akses menjadi penghambat. "Kami juga terus mengevaluasi kelemahan dalam penanganan sampah, utamanya pengambilan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS)," sebut Tita.

Satu hal yang tahun ini pihaknya upayakan ialah segera terbitnya perbup tentang waktu buang sampah. Memperkuat edaran dan pelaksanaan teknis jam membuang sampah dari pukul 18.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita.

"Target kami secepatnya untuk

ada perbup terkait jam pembuangan sampah. Ini mengatur supaya masyarakat terbiasa disiplin membuang sampah sesuai jam pembuangan," ungkap dia.

Regulasi itu berguna untuk mengontrol TPS. Jam pembuangan berfungsi mengatur penumpukan sampah dan armadanya dapat beroperasi sesuai jam kerja mereka.

Untuk diketahui, draft Perbup Jam Buang Sampah ini sejatinya telah diusulkan sejak 2022 lalu. Namun hingga kini prosesnya masih berada di Bagian Hukum Setkab PPU.

"Sebelumnya sudah disusun dan dikirimkan ke Biro Hukum Pemprov Kaltim. Tapi masih ada harmonisasi beberapa poin di dalamnya. Semoga segera rampung dan bisa diterbitkan," tutup Tita. (adv/sbk)



Personel Regu Satpol-PP PPU saat melakukan patroli dan sosialisasi ke PKL di area Pasar Waru.

## Satpol PP PPU Patroli PKL di Area Pasar Waru

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) kembali menggelar patroli pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Kali ini dilakukan di kawasan Kecamatan Waru.

Pengawasan kali ini dilakukan oleh Regu I Satpol-PP PPU. Dipimpin oleh Komandan Regu I, Isa Ansoni. "Tim melaksanakan kegiatan pengendalian PKL yang berjualan di badan jalan di wilayah Kecamatan Waru," ujarnya, Selasa (20/6/2023).

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan dimulai sejak di markas besar Satpol-PP PPU di Kilometer 9 Nipah-Nipah sekira pukul 13.30 Wita.

Mengenakan armada unit reaksi cepat (URC), bertolak ke lokasi fokus sekira pukul 13.45 Wita.

Lokasi yang disasar kali ini berada di kawasan sekitar Pasar Waru. Di sana tim memastikan tidak ada PKL yang berjualan memakan badan jalan.

"Tim Regu I tiba di Pasar Waru dan langsung melakukan patroli sekitaran area. Tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Pasar Waru, situasi aman terkendali," jelas Isa.

Dalam giat kali ini, sekira 10 personel diturunkan. Meski tidak ada pelanggaran yang terjadi, pihaknya

tetap melakukan pemantauan di lokasi tersebut.

"Tim Regu I standby di sekitaran lokasi, dan memastikan tidak ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan tersebut," imbuhnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan situasi di area pasar tersebut tetap tertib. Sebab diketahui di area ini kerap terjadi pelanggaran, khususnya pada hari pasar.

"Kami terus melakukan sosialisasi dan imbauan secara langsung pada para pedagang untuk tetap patuh berjualan, tanpa mengganggu aktifitas di jalan," tutupnya. (adv/sbk)

**Koran DIGITAL**  
**MEDIA KALTIM.com**  
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033

media\_kaltim   mediakaltimdotcom   mediakaltim.com   media kaltim



IG DISPOPAR

Kegiatan simulasi penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

## Dispopar Gelar Simulasi Penggunaan Aplikasi SRIKANDI

BONTANG - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang menggelar simulasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kegiatan ini dihelat di Ruang Rapat Dispopar Bontang, beberapa waktu lalu.

Kegiatan dimonitoring langsung Sekretaris Dispopar Bontang, Rita

Atin Widiarti. Dimana dalam agenda ini, Dispopar mengumpulkan seluruh admin SRIKANDI di setiap bidang yang ada di lingkungan Dispopar Bontang, mulai dari bidang umum, pemuda, olahraga dan pariwisata.

"Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui teknis dan sistem kerja dari aplikasi SRIKANDI," beber Rita. Diketahui, aplikasi ini bertujuan

untuk menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik, yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintah.

"Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online dan terintegrasi, serta terekam pada pusat data elektronik," pungkasnya. (adv/al)

## Kadispopar Monitoring ODTW di Wilayah Pesisir Bontang

BONTANG - Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem menyambangi beberapa wilayah pesisir yang ada di Kota Bontang, Rabu (15/6/2023) lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka survei dan monitoring Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) pesisir Kota Bontang.

Beberapa wilayah pesisir yang dimonitoring oleh Kadispopar di antaranya Pulau Gusung, Malahing, Tihi-Tihi, dan Selangan.

Kampung Malahing menjadi salahsatu yang rutin disambangi akhir-akhir ini, lantaran Malahing berhasil menjadi satu-satunya wilayah di Kalimantan Timur yang masuk dalam 75 besar Anugerah Desa wisata Indonesia (ADWI) 2023.

"Monitoring perlu terus dilakukan sebagai upaya persiapan kedatangan Tim Juri ADWI 2023 untuk melakukan penilaian," ujar Aznem.

Kedatangan Kadispopar Bontang itu untuk meninjau langsung progress perkembangan jembatan dan spot foto yang saat ini sudah capai 50 persen. Harapannya dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, Kampung Malahing bisa menjadi objek wisata favorit untuk para pengunjung menikmati pemandangan sunrise maupun sunset.

"Tak hanya Tim Juri ADWI 2023, namun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno diperkirakan akan hadir, sehingga segala persiapan sedang digenjut," ucapnya.

Selain ke Kampung Malahing, Kadispopar Bontang juga melakukan survei lokasi ke Tihi-tihi, Gusung, dan

Selangan untuk memantau kondisi fasilitas di daerah pesisir tersebut.

Tentunya, akan ada perbaikan untuk memberikan kenyamanan kepada warga pesisir. Mulai dari ketersediaan air bersih, hingga fasilitas pendukung lainnya yang akan membantu mobilisasi masyarakat setempat, contohnya jembatan, kemudian fasilitas tambahan seperti gazebo untuk tempat bersantai. Bahkan wacananya akan dibangun resto yang menyajikan makanan khas setiap wilayah tersebut. (adv/al)



IG DISPOPAR

Kegiatan Kadispopar saat melakukan monitoring ODTW di wilayah pesisir Bontang.

# Malam Ini Grand Final Putra Putri Pariwisata Bontang 2023!

**BONTANG** – Pemilihan Putra Putri Pariwisata Kota Bontang Tahun 2023 mendekati puncaknya. Malam ini, Selasa (20/6/2023) para finalis dijadwalkan akan mengikuti tahap akhir, yaitu babak grand final, yang akan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang.

Ketua Ikatan Alumni Putra Putri Wisata Bontang, Trendy Polkanov menjelaskan, bahwa event garapan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang ini sudah berlangsung sejak tanggal 10 Juni 2023 lalu dan akan berakhir Rabu (21/6/2023).

Diceritakan, awalnya audisi diikuti sebanyak 72 peserta yang terdiri dari 20 peserta laki-laki dan 52 peserta perempuan. Seluruh peserta

mengikuti tahapan audisi yang berlangsung selama 2 hari 10-11 Juni di Auditorium Dispopar Bontang.

“Tanggal 10 Juni peserta mengikuti tes tulis dan performance. Kemudian tanggal 11 interview sekaligus pengumuman 10 putra dan 10 putri yang terpilih sebagai finalis,” ujarnya.

Berikutnya, ke-20 finalis menjalani pra karantina yang berlangsung tanggal 12-16 Juni. Para finalis mengikuti kegiatan foto shoot, ko-reografi, dan kunjungan ke spot-spot wisata di Bontang seperti Kampung Malahing.

Lalu di tanggal 17-21 Juni para peserta mengikuti tahap karantina di Hotel Bintang Sintuk.

“Tanggal 18 Juni kemarin para

peserta mengikuti unjuk bakat talent show Putra Putri Pariwisata Bontang 2023 di Bontang Citi Mall. Dan malam ini puncak acara babak grand final,” bebernya.

Kegiatan ini rutin diadakan 2 tahun sekali. Namun karena wabah covid-19 lalu kegiatan ini terhenti sementara. Diadakan untuk memilih role model dan icon untuk pariwisata Bontang. Di akhir acara akan dipilih sepasang Duta Wisata Putra Putri dan Putri Pariwisata Bontang di tahun 2023 ini.

“Para pemenang akan mengikuti segala kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan pariwisata Bontang atau yang diadakan oleh Dispopar Bontang selama 2 tahun ke depan,” pungkasnya. (adv/al)



ISTIMEWA

Kegiatan unjuk bakat talent show Putra Putri Pariwisata Bontang 2023 di Bontang Citi Mall, Minggu (18/6/2023).



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Brigas Karadenas No. 116A, Sekeloa Indah, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

1 800 100 1000

TOYOTA LET'S GO BEYOND

**SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN**  
\* TOYOTA MOTOR OIL

**Khusus Taxi Online & Travel**

**GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE**

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang



# Mahakam Ulu Diguncang Gempa 4,6 Magnitudo

**BALIKPAPAN** - Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan mencatat telah terjadi gempa bumi di kawasan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur pada Selasa (20/6/2023) sekitar pukul 13.45 WITA.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmid mengatakan, berdasarkan data yang masuk ke Geofisika menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter  $M=4.6$ . Getaran tersebut diketahui memang telah terdeteksi oleh aplikasi pendeteksi bencana inARISK terkait adanya peristiwa lindu alias gempa bumi.

"Episentrum gempa terletak pada koordinat 1.117 LU dan 114.99 BT, atau tepatnya berlokasi 47 km Tenggara Mahulu, Kalimantan Timur pada kedalaman 10 km," ujarnya.

Lebih lanjut Rasmid menjelaskan, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi kerak dangkal akibat proses deformasi di batuan. Demikian diketahui dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter.

"Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Mahulu dan Samarinda dengan intensitas III MMI," jelasnya.

Atas kejadian tersebut mengakibatkan getaran yang dirasakan

masyarakat sangat nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Hingga saat ini tidak terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi tersebut, begitupun terkait aktivitas gempa susulan.

"Hasil monitoring BMKG hingga pukul 14.20 WITA belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan," tambahnya.

Kepada masyarakat di wilayah Mahulu, Samarinda dan sekitarnya, diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi," tutup Rasmid. **(bom)**



## Gempa 4,6 Magnitudo Guncang Mahulu, Terasa Hingga Samarinda

**SAMARINDA** - Gempa bumi dengan kekuatan berskala 4,6 magnitudo dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat mengguncang kawasan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (20/6/2023) sekitar pukul 12.50 wita siang tadi.

Peristiwa itu juga sempat viral di Sosial Media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp lantaran pertama kali terjadi di Kabupaten Mahulu. Bahkan, getaran berskala kecil juga diakui warga internet sempat terasa hingga ke Kota Samarinda.

Meski begitu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Samarinda, Suwarso mengaku jika pihaknya tidak merasakan adanya getaran akibat dari gempa bumi itu.

Suwarso juga mengaku memang pihak dari BMKG sempat menghubungi pihaknya untuk menanyakan efek dari gempa itu di Samarinda.

"Tidak terasa. Mungkin saja di daerah lain ada yang merasakan tapi sampai saat ini belum ada laporan masuk. Hanya skala kecil," ucap Suwarso saat dihubungi awak media.

Suwarso mengatakan bahwa pihaknya juga turut memantau perkembangan gempa yang itu.

Bahkan ia juga sempat berkomunikasi dengan Kepala Pelaksana (Kalak) III BPBD Mahulu terkait gempa bumi itu.

"Dari komunikasi dengan pihak BPBD Mahulu, tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan akibat gempa itu," ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa meski sebagian orang ada yang mengaku merasakan gempa itu di Samarinda, namun di pastikannya hanya skala kecil saja, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Tidak perlu khawatir, jadi harapannya masyarakat tetap tenang," pungkasnya. **(vic)**



ISTIMEWA

Barang bukti 15 poket sabu-sabu seberat 4,2 gram yang berhasil diamankan Polsek Muara Muntai.

## Apes, Nelayan Penjual Sabu di Muara Muntai Akhirnya Menginap di Penjara

**TENGGARONG** - Dua orang nelayan di Desa Muara Muntai Ilir harus menerima kenyataan, bahwa untuk sementara waktu menginap di balik jeruji tahanan Mapolsek Muara Muntai. Keduanya kedapatan memiliki 15 poket sabu ukuran kecil, pada Jumat (16/6/2023) sekitar pukul 13.30 WITA. Kedua pelaku masing-masing FI (44) dan HA (34).

Keduanya diringkusnya Unit Reskrim Polsek Muara Muntai di kediamannya, tepatnya di RT 4Kampung Lawi. Keduanya ditangkap saat sedang beristirahat.

Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah para pelaku, poli-

si mendapati 15 poket sabu-sabu seberat 4,2 gram siap edar ini di dalam dompet berwarna biru, yang disimpan rapi di dalam lemari.

"Ditemukan di dalam 1 buah tas kecil warna biru di dalam lemari," ujar Kapolsek Muara Muntai, AKP Ahmad Said pada mediakaltim.com, Selasa (20/6/2023).

Said mengatakan, mengedarkan sabu-sabu menjadi pekerjaan sampingan mereka. Untuk menambah kebutuhan sehari-hari mereka, di samping mencari ikan sebagai nelayan. Mereka pun membeli sabu-sabu dari seseorang yang tidak mereka kenal. Dalam kurun wak-

tu dua bulan terakhir ini. Namun karena kerap meresahkan warga, pekerjaan sampingan yang baru ditekuni selama 2 bulan terakhir ini, menyebabkan mereka berurusan dengan polisi.

"Mereka bukan residivis, pekerjaan mereka nelayan, mereka pakai dan (sabu-sabu) juga dijual," lanjutnya.

Kini, mereka pun sudah digelandang ke Mapolsek Muara Muntai. Keduanya terancam Pasal 114 Ayat 1 Junto Pasal 112 Ayat 1 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika. (afi)



ISTIMEWA

Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo.

## Pancing Wisatawan, Dispar Kukar Siapkan ATWI Kukar 2023

**TENGGARONG** - Beragam cara dan upaya dilakukan Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) dalam meningkatkan sektor pariwisatanya. Salah satunya meningkatkan kualitas destinasi wisata untuk kunjungan para pelancong. Karena kunci sektor pariwisata, ada pada destinasi yang akan dikunjungi.

Kini, Dispar Kukar punya cara tersendiri agar pemilik tempat wisata bisa mengembangkan wisata miliknya, agar bisa saling bersaing. Salah satunya dengan menyelenggarakan Anugerah Tempat Wisata Idaman (ATWI) Kukar 2023.

Rangkaian sudah berjalan sejak awal Juni hingga 20 Agustus nanti. Hampir mirip-mirip Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) garapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Selain menerima peserta dari desa yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), BUMDes dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Juga menerima tempat wisata yang dikelola oleh sektor swasta.

Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo, menyebut ketika tempat wisatanya bagus, maka banyak multiplier effect yang dirasakan. Paling utama meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kukar, home stay atau penginapan bagi wisatawan yang akan penuh, UMKM hingga sektor kuliner pun bakal kebagian rezeki.

"Keinginan kita untuk mensupport dan memotivasi kawan-kawan pemilik tempat wisata di Kukar untuk mengelolanya dengan baik," ujar Slamet Hadiraharjo.

Di sisi lain, keberadaan tempat wisata yang cukup banyak di Kukar, perlu polesan lebih dalam menampilkan

konsep wisatanya. Maka agenda yang langsung dinilai oleh tim juri yang berasal Universitas Mulawarman (Unmul), Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Unikarta Tenggarong ini, bisa memantik para pemilik tempat wisata untuk terus berbenah lagi.

Lebih lanjut, dari ratusan tempat wisata di Kukar akan dijaring menjadi 32 besar. Barulah setiap nominasi yang lolos, akan kembali mencari peruntungan di 4 kategori yang disiapkan. Yakni kategori Daya Tarik Pengunjung, kategori Pemasaran, kategori Kelembagaan, dan kategori Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan.

"ATWI diselenggarakan dalam upaya memberikan apresiasi kepada pengelola destinasi (wisata) di Kutai Kartanegara," tutup Slamet. (afi)

# DTPHP Kutim Klaim Hewan Kurban Sehat dan Bebas PMK

**SANGATTA** - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur (Kutim) melalui Bidang Peternakan dan Tim Kesehatan Hewan (Keswan) menegaskan bahwa hewan kurban yang akan dijual dalam keadaan sehat. Hal ini berdasarkan dari hasil pengecekan di lapangan belum lama ini.

Tak hanya itu, DTPHP juga menyatakan bahwa hewan kurban yang tersedia dari beberapa pengepul dan penjual sapi di pinggir jalan maupun di Rumah Potong Hewan (RPH) dapat mencukupi kebutuhan untuk kurban di Hari Raya Idul Adha 2023.

Dari siaran pers yang diterima Radar Kutim, tim pengecekan dibagi menjadi dua zona yakni pertama untuk pemeriksaan di Kecamatan Sangatta Utara. Selanjutnya, untuk tim kedua di Sangatta Selatan dipimpin langsung oleh drh Ririn Mei-

yani Veronica Sima.

Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum melalui Kabid drh Kurniawan menerangkan bahwa petugas langsung melakukan sejumlah pendataan dengan mendatangi lokasi penjualan.

"Kita langsung mengecek seperti jumlah hewan kurban, nama penjual atau pedagang, lokasi tempat penjualan dan asal hewan kurban. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kondisi fisik kesehatan hewan kurban secara umum," terangnya.

Kemudian, petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada tempat penjualan hewan kurban, setelah pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban dilakukan dan hewan terbukti dalam kondisi sehat. Dari hewan kurban yang telah diperiksa kondisinya sehat, tidak ada sapi yang menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Tim Keswan DTPHP sendiri sudah dibekali bagaimana mendeteksi gejala PMK pada hewan kurban. Secara umum pemeriksaan dilakukan pada kuku dan mulut hewan, selain itu juga dicek cara hewan berdiri dan berjalan untuk mendeteksi apakah hewan pincang atau tidak," bebernya.

Untuk diketahui, dari hasil pemeriksaan hewan kurban seperti sapi berasal dari Kutim dan ada yang didatangkan dari luar Kutim mulai dari Sinjai, Bone, Kupang dan Halmahera Utara. Pemeriksaan meliputi SKKH dari daerah asal maupun dari karantina serta memastikan sapi yang didatangkan sudah melalui tes terhadap penyakit Brucellosis, Jembrana dan PMK. Dalam melakukan kegiatan ini, DTPHP Kutim turut dibantu tim dari Unit Ekonomi Satuan Intelkam Polres Kutim. (rkt1)



# Pemilu 2024, DPT Kabupaten Paser Sebanyak 211.377 Pemilih

**PASER** – Sebanyak 211.377 warga Kabupaten Paser ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser sebagai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Penetapan itu berdasarkan rapat pleno KPU di Hotel Kyriad Sadurengas, Selasa (20/6/2023).

Dari jumlah tersebut, Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid memastikan, adanya penambahan jumlah DPT dari Pemilu 2019 lalu. Penambahan itu mencapai 25.690 DPT, sesuai jumlah DPT di Pemilu 2019 sebanyak 175.687 DPT.

“Untuk DPT sekarang itu di 211.377 pemilih, jadi ada peningkatan. Kita berharap data yang telah ditetapkan akurat di lapangan sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari,” kata Qayyim.

Total DPT Kabupaten Paser untuk Pemilu 2024 ini, dengan rincian laki-laki sebanyak 110.068 pemilih dan perempuan 101.309 pemilih serta tersebar di 139 Desa dan 5 Kelurahan yang ada di 10 Kecamatan, Kabupaten Paser.

Qayyim menyebut, beberapa faktor yang membuat DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Paser mengalami penambahan, di antaranya peningkatan jumlah penduduk, adanya pensiunan (TNI-Polri), pindah domisili, TPS khusus dan pemilih pemula.

“Pemula ada, kemudian yang pensiun dari TNI Polri juga ada, pemilih



TB/MEDIA KALTIM

## Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid

pemula juga ada, banyak faktor lah,” ungkapnya.

Berdasarkan Data KPU, di Kabupaten Paser menunjukkan jumlah pemilih baru sebanyak 2.662 pemilih, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 1.867 pemilih, perbaikan data pemilih 1.424 pemilih, dan pemilih potensial non e-KTP mencapai 4.523 pemilih.

Nantinya, dari hasil penetapan DPT itu, pihak KPU Kabupaten Paser bakal menjadikan jumlah tersebut

sebagai landasan dasar dalam menentukan kebutuhan logistik pemilihan saat pelaksanaan berlangsung. Dengan penambahan jumlah DPT ini, pastinya kebutuhan logistik juga akan meningkat.

“Jadi itu nanti dasar kami untuk menentukan kebutuhan logistik. Pastinya bertambah ya, menyesuaikan jumlah DPT,” pungkasnya. (bs)

## RINCIAN DPT KABUPATEN PASER PADA PEMILU 2024 PER KECAMATAN:

1. Batu Sopang: 9 Desa, 77 TPS, 18.873 DPT, 10.019 Laki-Laki, 88.54 perempuan.
2. Tanjung Harapan: 7 Desa, 31 TPS, 7.688 DPT, 4.188 Laki-Laki, 3.480 Perempuan.
3. Paser Belengkong: 15 Desa, 87 TPS, 21.805 DPT, 11.194 Laki-Laki, 10.611 Perempuan.
4. Tanah Grogot: 16 Desa/Kelurahan, 210 TPS, 57.918 DPT, 29.239 Laki-Laki, 28.679 Perempuan.
5. Kuaro: 13 Desa/Kelurahan, 88 TPS, 22.014 DPT, 11.343 Laki-Laki, 10.671 Perempuan.
6. Long Ikis: 26 Desa/Kelurahan, 126 TPS, 31.215 DPT, 16.037 Laki-Laki, 15.178 Perempuan.
7. Muara Komam: 13 Desa/Kelurahan, 47 TPS, 10.098 DPT, 5.343 Laki-Laki, 4.755 Perempuan.
8. Long Kali: 23 Desa/Kelurahan, 92 TPS, 20.379 DPT, 10.723 Laki-Laki, 9.656 Perempuan.
9. Batu Engau: 13 Desa, 65 TPS, 16.082 DPT, 9.084 Laki-Laki, 6.998 Perempuan.
10. Muara Samu: 9 Desa, 23 TPS, 5.325 DPT, 2.898 Laki-Laki, 2.427 Perempuan.

(Sumber: KPU Kabupaten Paser)



Bupati Paser, Fahmi Fadli

## Demi Profesionalitas Kelola Pemerintahan, Fahmi Beri Pesan Khusus untuk Pegawai

**PASER** - Bupati Paser, Fahmi Fadli, berikan pesan khusus kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser agar serius melakukan pengawasan dan manajemen kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Hal itu ia sampaikan saat melantik 195 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional dan 155 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tenaga Guru Formasi Tahun 2022, di Gedung Awa Mangkuruku, Kecamatan Tanah Grogot, Senin (19/6/2023) lalu.

"Bagi Kepala BKPSDM, saya berharap agar benar-benar membina, mengarahkan dan melakukan pengawasan manajemen kepegawaian," kata Fahmi.

Pesan serupa bagi tenaga pendidik juga ia sampaikan dengan menekankan bahwa guru bukan hanya sekedar profesi. Melainkan juga memiliki tanggung jawab

moral dalam mendidik para generasi bangsa yang akan menentukan pembangunan ke depannya.

"Akhir-akhir ini, kita digempur oleh permasalahan yang cukup kompleks dalam dunia pendidikan. Besar harapan saya, sebesar impian bahwa kelak dari Kabupaten Paser akan lahir anak bangsa, generasi yang tangguh dan kuat menghadapi kemajuan zaman," harapnya.

Ia mengharapkan agar pelajaran yang diterima siswa tidak hanya untuk membangun mental, namun dapat pula membangun Kabupaten Paser. "Terlebih, pemindahan ibukota negara nusantara menjadi momen untuk menyiapkan diri agar turut ambil bagian bukan sebagai penonton," tambahnya.

Sementara kepada pejabat fungsional maupun guru, agar mampu mengemban dan melaksanakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang itu mengamanahkan profesionalisme

dan mampu melaksanakan tugas pelayanan publik.

Sehingga, tugas pemerintahan serta tugas pembangunan secara optimal dapat berjalan. "Mari kita tingkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan, serta tingkatkan kualitas SDM yang berdaya saing," ajak Fahmi.

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan terdapat 30 jenis formasi jabatan yang telah diangkat dalam jabatannya. "Bagi para pegawai yang baru dilantik hari ini, segeralah menyesuaikan diri dengan formasi jabatan yang dimiliki," imbuah Fahmi.

Ia meyakini, para pejabat yang dilantik dapat mengembangkan diri secara profesional, mengubah mindset, serta melaksanakan tugas sesuai kompetensi. "Disiplin dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. (bs)



Kantor Desa Tanah Priuk di Kabupaten Paser

## Diduga Korupsi, Kades di Paser Ternyata Sudah Ditahan 10 Hari

**PASER** – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Paser diam-diam telah menahan pria berinisial AR yang merupakan Kepala Desa (Kades) Tanah Priuk, di Kecamatan Tanah Grogot. Penahanan bahkan sudah berlangsung sekitar 10 hari atas dugaan tindak pidana korupsi.

Hal itu dibenarkan Kasatreskrim Polres Paser, AKP Gandha Syah Hidayat yang menahan AR. Penahanan ini dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terkait dengan kasus Kades Tanah Priuk periode sebelumnya yang sudah lebih dulu divonis pidana.

Menariknya, penahanan AR dilakukan bukan karena jabatannya sebagai Kades. Namun, pada 2019 silam, ia yang masih menjabat sebagai Perangkat Desa Tanah Priuk. Ia diduga turut terlibat atas tindakan

korupsi pimpinannya terdahulu.

“Pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, saat itu menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) APBDes 2019,” kata Gandha, didampingi Ps Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Paser, Aiptu Untung Budi, Selasa (20/6/2023).

Atas kasus tersebut, Satreskrim menjerat pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sangkaan pasal itu lantaran AR diduga turut serta dalam tindakan korupsi.

Sementara kerugian negara yang bersumber dari APBDes 2019 itu mencapai Rp 767 juta dari total anggaran Rp 2,2 miliar serta APBDes 2018 sebesar Rp 1,6 miliar. AR

diduga terlibat di beberapa pembangunan kegiatan fiktif, penggelembungan harga, hingga manipulasi administrasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Paser, Chandra Irwanadhi menyampaikan, belum ada keterangan atau surat resmi atas penahanan AR ke DPMD Kabupaten Paser sebagai OPD yang menaungi Pemerintahan Desa (Pemdes).

Sehingga dia belum melakukan penggantian pejabat sementara di Desa Tanah Priuk. Namun Chandra sudah mendengar informasi ini dari beberapa sumber seperti Camat Tanah Grogot. “Saya juga sebelumnya sudah ada dimintai keterangan oleh pihak polres,” kata Chandra. (bs)

# Ketua DPRD Minta Data Penduduk Non Permanen Segera Diselesaikan

PPU - Para pekerja yang berada di Ibukota Negara (IKN) Nusantara berstatus sebagai penduduk non permanen. Pada dasarnya status tersebut segera dilakukan pendataan dari pihak terkait baik RT setempat maupun Dinas terkait.

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor mengatakan kehadiran para pekerja wajib dilakukan pendataan, apalagi status para pekerja sebagai penduduk non permanen.

"Setidaknya RT setempat lakukan pendataan terkait ini, dan dinas terkait lakukan sosialisasinya agar para pekerja yang berstatus sebagai penduduk non permanen ini terdata dengan jelas," ungkapnya. Selasa (20/6/2023)

Diketahui ada sekitar ratusan para pekerja yang belum mengisi data tersebut. Pengisian data tersebut berbentuk link yang terkoneksi dari pusat.

"Alangkah baiknya dinas terkait jemput bola. Ini akan menjadi problem mendatang jika ini tidak terselesaikan secepatnya," tegasnya.

DPRD PPU berharap penduduk non permanen ini segera diselesaikan salam pendataannya, bukan kita yang menunggu-menunggu alangkah baiknya kita lakukan jemput bola agar segala urusannya terselesaikan dengan cepat.

"Pastinya kami berharap kepada RT dan terkait dapat melakukan penyelesaiannya ini sesegara mungkin, agar apa yang menjadi kegelisahan kita bersama bisa teratasi dengan adanya penduduk non permanen tersebut," Pungkasnya. (nrd)



DEDDY/RADARMEDIA

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor.



LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

**BTS**

di Digiroom





DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*



THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Kode Promo  
**BTSOLI**

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan  
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

\*Syarat dan ketentuan berlaku



Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang





Suasana kebakaran di Jalan M Said, Gang 2, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, pada Selasa (20/6/2023).

## Kebakaran di Jalan M Said, Tiga Rumah Ludes

SAMARINDA - Tepat pada saat masyarakat hendak beraktivitas, si jago merah tiba-tiba mengamuk hingga membuat warga di Jalan M Said, Gang 2, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang panik berhamburan. Peristiwa kebakaran terjadi pada Selasa (20/6/2023) sekitar pukul 06.00 wita.

Sedikitnya tiga rumah tunggal ludes dilahap si jago merah. Sebanyak 3 Kepala Keluarga (KK) yang beranggotakan 8 jiwa terpaksa kehilangan tempat tinggal akibat dari peristiwa tersebut.

Mendapati kabar itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda dibantu relawan langsung mendatangi lokasi kejadian guna melakukan pemadaman api.

"Kami turunkan 6 unit tanki fire truk dibantu juga dengan 13 mesin portabel relawan," ucap Kepala Disdamkar Kota Samarinda, Hendra AH saat dikonfirmasi awak media di lokasi kejadian.

Setelah selama kurun waktu satu

jam 30 menit lamanya api berkobar menghancurkan tiga bangunan, akhirnya pemadam pun berhasil menjinakkan kobaran api.

Dalam peristiwa tersebut, Hendra AH mengatakan bahwa asal mula api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai dua rumah warga.

"Api pertama kali timbul di lantai

dua rumah bapak Herlianto," ungkapnya.

Soal penyebab pastinya peristiwa kebakaran, Hendra AH mengungkapkan saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. "Api cepat menyambar karena bangunan terbuat dari material kayu," pungkasnya. (vic)





## 4.940 Calon Mahasiswa Asal Kaltim Lolos Seleksi Jalur SNBT

**JAKARTA**-Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 223.217 pendaftar dari total pendaftar sejumlah 803.852 orang dinyatakan lolos seleksi jalur SNBT.

Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari mengungkapkan, dari jumlah total yang dinyatakan lolos seleksi tersebut, 80.896 orang di antaranya merupakan pendaftar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan 149 pendaftar difabel.

"Jumlah pendaftar yang diterima pada SNBT 2023 tersebut didasarkan pada kuota minimum 40 persen dari seluruh daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selain PTN BH dan kuota minimum 30 persen dari seluruh daya tampung pada PTN BH. Jumlah total daya tampung yang tersedia sebanyak 259.635 kursi yang tersebar di

75 PTN ( universitas/institut), 18 PTKIN (UIN) dan 43 PTN Vokasi se-Indonesia," terang Ashari dalam konferensi pers di Aula Kemendikbudristek, Selasa (20/6/2023).

Menariknya, dari paparan yang ditampilkan oleh tim pelaksana SNPMB kali ini juga dibebaskan jumlah pendaftar dari masing-masing provinsi. Untuk provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat ada sebanyak 14.368 pendaftar dan yang diterima sebanyak 4.940 orang dengan tingkat keketatan 34,38 persen.

"Jumlah pendaftar yang lulus SNBT 2023 ini telah melalui proses yang dimulai dari pendaftaran, Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang kemudian diseleksi melalui hasil UTBK dan kriteria lainnya," jelas Ashari.

Adapun dibebaskan pula 10 PTN dengan pendaftar terbanyak adalah Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret,

Universitas Diponegoro, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Negeri Surabaya.

Selain itu 10 Program Studi (Prodi) terketat antara lain Ilmu Komunikasi (UNJ), Teknologi Informasi (UNY), Kriminologi (UI), Pendidikan Teknik Informatika (UNY), Bisnis Digital (UNS), Sistem dan Teknologi Informasi (UNJ), Teknik Pertambangan (UNP), Kedokteran (UGM), Teknologi Informasi UGM) dan Kedokteran Gigi (Undip).

"Kepada pendaftar yang lulus kami ingatkan agar segera mengetahui jadwal pendaftaran uang calon mahasiswa baru di laman PTN masing-masing. Bagi peserta yang tidak lulus atau belum diterima jangan berputus asa dan tetap semangat. Karena masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi Jalur Mandiri yang digelar oleh beberapa PTN," pungkasnya. (cha)



## Cegah Korupsi, Panitia SNPMB Minta KPK Kawal Penerimaan Jalur Mandiri di PTN

**JAKARTA** - Guna menghindari terjadinya kembali kasus korupsi dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru Jalur Mandiri di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) minta pengawalan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari mengungkapkan, sejak awal proses seleksi penerimaan hingga saat ini pihaknya selalu didampingi dan berkoordinasi dengan KPK.

"Jadi kita berkoordinasi dengan KPK. Untuk pelaksanaan di semua jalur kami koordinasi terus," ungkap Ashari di Gedung Kemendikbudristek, Selasa (20/6/2023).

Bahkan, lanjut Ashari, tim pelaksana SNPMB pada 17 Juni 2023 lalu juga telah mengundang seluruh majelis rektor dan wakil rektor 1 untuk mensosialisasikan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPK terkait panduan pelaksanaan untuk jalur mandiri.

"Jadi kita sudah ada guidancenya. Jadi insya Allah lebih terarah dan tertata. Sehingga diharapkan tidak ada yang menyimpang. Kita

juga beberapa kali terus melakukan pertemuan. Lumayan lah kita jadi dikawal terus oleh KPK," serunya.

Diketahui, KPK sebelumnya telah mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

Karenanya, KPK kini memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Rekomendasi tersebut diberikan untuk menyempurnakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur nonreguler tersebut. (cha)



FOTO : NICHIA / MEDIAKALTIM

Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari saat ditemui wartawan usai konferensi pers di Aula Kemendikbudristek.

## Jangan Khawatir, Sisa Kuota Penerimaan Mahasiswa Jalur SNBT Dialihkan ke Jalur Mandiri

**JAKARTA**-Jumlah total daya tampung yang tersebar di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di tahun 2023 ini adalah sebanyak 259.635 kursi. Sementara yang dinyatakan lolos seleksi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebanyak 223.217 orang.

Artinya, berdasarkan data tersebut diketahui adanya ketersediaan sisa kuota sebanyak 36.418 kursi.

Mengenai hal ini, Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari mengatakan bahwa siswa kuota yang tersedia akan dialihkan ke jalur seleksi berikutnya, yakni Jalur Mandiri.

"Sekarang ada 14 persen yang

belum terisi. Sebelumnya ada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) ada sekitar kurang dari 5 persen. Jadi role-nya jika SNBP belum terisi itu dipindahkan ke SNBT sekarang ini. Jadi lebih besar dibandingkan awalnya. Tapi ternyata ini belum terisi juga, jadi akan kita geser ke jalur mandiri," ungkap Ashari kepada wartawan saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Kemdibukristek, Selasa (20/6/2023).

Dengan begitu, Ashari mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan berkecil hati. Utamanya, bagi para pendaftar yang belum lolos seleksi atau belum diterima.

"Jadi masyarakat jangan khawa-

tir. Dengan adanya kuota kosong itu, nanti akan dialihkan dengan jalur berikutnya," tutur Ashari.

Masih di tempat yang sama, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Nizam mengucapkan selamat bagi siswa yang lolos seleksi UTBK SNBT 2023. Bagi yang belum lolos, ia mengingatkan bahwa masih ada berbagai jalur masuk ke PTN dan PTS terakreditasi.

"Jangan patah semangat, masih ada jalur mandiri PTN maupun PTS yang bagus-bagus, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan lebih banyak dari PTN. Hati-hati memilih, lihat akreditasinya lewat website dan kakak-kakak kelas," kata Nizam. (cha)



## INDONESIA JUSTICE CONFERENCE 2023



**Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.J.P.**  
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia  
Subject to confirmation

**Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Fookh, S.H., M.Hum**  
Nasib Mahkamah Konstitusi

**Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana**  
Senior Pastor of BBI ROCK Ministry

**Mark Mudri**  
Church Believer SA ACT Bible Society Australia  
Chair Global Summit of Advocates International

**Fredrik J. Pinakunary, SH., SE.**  
Advokat

**Tony Budidjaja, SH., LL.M, Dipl. CI Arb., FCI Arb.**  
MANAGING PARTNER SUNDAS INTERNATIONAL LAWYERS  
DIRECTOR LAUYERIAL LEGAL JUSTICE CENTER

**Dr. Albert Arias, SH., MH**  
PANGKAP PER UNIVERSITAS TRIKORA

### OTHER SPEAKERS:

Pdt. Matius Arif Mirdjaja, SH | Dr. Stefanie Hartanto, SH., M.Kn | Pdt. Kongkin Atmodjo  
Dr. Linda Bustan, M.Div. | Yonathan Andre Baskoro, S.H., LL.M., M.AP and many more...

### THEME

## Restoring Justice, Transforming Nation

Amos 5:24 "Tutail biarlah **keadilan** bergulung-gulung seperti air dan **kebenaran** seperti sungai yang selalu mengalir."



**30 JUNE  
- 01 JULY  
2023**



**MENORAH HALL  
LEMBAH PUJIAN**  
JL. ANTASURA - NANGKA UTARA,  
DENPASAR UTARA, BALI



**REGISTRATION  
FEE:**

1. PROFESIONAL IDR. 300.000  
2. PELAJAR DAN MAHASISWA IDR. 200.000



Registration:  
<http://tiny.cc/indojc2023>

Information:  
Michelle - 082217014339  
Junus BM - 0821 1021 1110